

USIA 103 TAHUN TAMANSISWA

'Terug Naar Het Front' — Kembali ke Medan Joang



LAHIRNYA Ta-

mansiswa tak bisa dilepaskan dari Ki Hadjar Dewantara (Terlahir dengan nama RM Soewardi Soeryaningrat di Yogyakarta pada 2 Mei 1889). Ki Hadjar Dewantara luas per-

gaulannya dengan tokoh-tokoh perjuangan nasional tatkala mengikuti pendidikan di STOVIA Jakarta. Sewaktu Boedi Oetomo didirikan, Ki Hadjar aktif di dalamnya, bertugas di bidang propaganda. Ki Hadjar juga pendiri *Indische Partij* bersama Douwes Dekker dan dr Tjipto Mangunkusumo.

Melalui pers, Ki Hadjar banyak menulis tentang semangat joang melawan penjajahan, membuat Kerajaan Belanda dan pemerintah Hindia-Belanda marah besar.

Akibatnya Ki Hadjar dibuang ke Negeri Belanda untuk dijauhkan dari rakyat, supaya tidak lagi memanas-manasi rakyat untuk melawan penjajahan Belanda. Tulisan Ki Hadjar dengan keras menyindir Kerajaan Belanda dan orang-orang Belanda yang memperingati 100 Tahun Kemerdekaan Negeri Belanda di tanah jajahannya Hindia Belanda, mestinya Belanda merasa malu.

Pada tahun 1919 Ki Hadjar pulang kembali ke Tanah-Air dengan semangat patriotiknya: *Terug naar het front* (kembali ke medan joang).

Ki Hadjar bersama istri beserta teman-temannya, tepatnya pada 3 Juli 1922 mendirikan *Nationaal Instituut Onderwijs Tamansiswa* (Perguruan Nasional Tamansiswa) yang berpusat di Yogyakarta.

Tamansiswa lahir tahun 1922 dalam kondisi bangsa Indonesia yang terjajah oleh kolonial Belanda. Keterjajahan dan kenyataan kolonial kejam yang dipraktikkan terhadap rakyat Indonesia ini menimbulkan semangat menolak kolonialisme. Sekolah-sekolah Tamansiswa sejak didirikan tahun 1922 itu memang mengajari dan menyadarkan murid-muridnya untuk anti penjajahan dan menolak penjajahan untuk merdeka.

Saat ini, setelah kita merdeka, kenapa kita nampak hanya menempatkan diri sebagai "penonton pembangunan" di Negeri kita sendiri? Barangkali karena paham kerakyatan meluntur, membuat kita *cuék* ketika pembangunan ternyata mengusir orang miskin dan bukan mengusir ke-

Prof Sri-Edi Swasono

miskinan. Lunturnya nasionalisme saat ini boleh dibilang merupakan darurat nasional. Kita lengah membedakan antara "pembangunan Indonesia" dengan sekadar "pembangunan di Indonesia". Badan-badan usaha asing dan konglomerat hitam mendominasi perekonomian Indonesia.

Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hadjar Dewantara, menegaskan (1928):

"...Pengajaran harus bersifat ke-



bangsaan... Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita...". Ini merupakan panduan dasar yang penting bagi mendesain sistem pendidikan nasional kita.

Kemudian di zaman persiapan kemerdekaan Ki Hadjar memformulasikan Pasal 31 (tentang Pendidikan) dan Pasal 32 (tentang Kebudayaan) pada UUD 1945 kita.

Itulah sebabnya tahun ini kembali saya mengingatkan Tamansiswa tentang perlunya paham nasionalisme, wawasan kebangsaan dan pelestarian kebudayaan diajarkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Bahwa dalam pembangunan kita harus berbekal ilmu pengetahuan, teknologi dan kewirausahaan. Ki Hadjar telah mengajarkan kepada kita perlunya memahami dengan seksama: *lawan sastra ngesti mulyo; Suci tata ngesti tunggal*, dan lain-lain, yang semuanya harus kita kaitkan dengan nasionalisme

dan patriotisme.

Kita memperingati 103 tahun Tamansiswa tanggal 03 Juli 2025 ini, untuk dapat dijadikan sebagai motivator dan dinamisor, agar dapat meneruskan gagasan-gagasan Ki Hadjar yang masih belum sepenuhnya terwujud, agar dapat mengagungkan wajah dan watak bangsa Indonesia yang carut marut dilanda berbagai tindakan yang kurang 'adab' seperti pelanggaran terhadap *Tri Pantangan* (*pantang menyalahgunakan kekuasaan, pantang menyalahgunakan keuangan, pantang melanggar susila*) dan pantang pula melakukan lain-lain kenistaan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara saat ini.

Tamansiswa mengutamakan pendidikan karakter, membentuk manusia yang

berbudi pekerti luhur, untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Untuk mencapai cita-cita luhur itu, Tamansiswa harus senantiasa memberi masukan-masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan bekerjasama dengan keduanya. Ini merupakan keharusan untuk menjaga marwah dan keberadaan Tamansiswa di Tanah Air.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Ki Hadjar dilantik sebagai Menteri Pengajaran,

Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet RI yang pertama. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1956 menerima gelar kehormatan Doktor HC dalam Ilmu Budaya dari UGM.

Beliau juga menjabat berbagai jabatan penting di pemerintahan. Ki Hadjar wafat pada 29 April 1959. Pada 28 November 1959 diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah. (*)

Prof Sri-Edi Swasono MPIA PhD, Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kebangkitan Nasional Indonesia



MARI memahami pemikiran-pemikiran besar para tokoh bangsa kita. Republik Indonesia yang luasnya sebesar Eropa, terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang bentangan Barat sampai Timur-

nya sama panjangnya dengan dari London sampai Kazakhstan. Demikian pula yang bentangan Utara sampai Selatannya, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote sama panjangnya dengan dari Kiev sampai Kairo. Indonesia merupakan negara yang terdiri 17.001 pulau yang disatukan oleh lautan, yang disebut sebagai Negara Kepulauan.

Kedudukan Indonesia telah ditetapkan PBB sebagai Negara Kepulauan melalui perjuangan yang dilakukan oleh diplomat-diplomat tangguh Indonesia, selama 25 tahun. Kita mencatat Prof Dr Mochtar Kusuma-atmadja, Dubes Chaidir Anwar Sani, Dr Hasjim Djalal dan beberapa lainnya adalah para ahli hukum laut Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan UNCLOS (United Nations Conventions on the Law of the Sea).

Saya akan memulai dengan dimensi sejarah, agak ke belakang dimulai dengan sejarah tentang Nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1905 tentara Jepang di Tsushima memporak-porandakan tentara Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia ini melahirkan "kebangkitan Asia". Bangsa kulit berwarna bisa mengguguli bangsa kulit putih dengan gemilang.

Imbasnya, tiga tahun kemudian, pada 20 Mei 1908, berdirilah gerakan nasional Boedi Oetomo, didirikan Dr Sutomo dan diinspirasi oleh Dr Wahidin Sudirohusodo, yang selanjutnya tanggal 20 Mei disebut Hari Kebangkitan Nasional. Ki Hadjar Dewantara bekerja pada Boedi Oetomo di Bagian Propaganda.

Pada tahun 1908, enam bulan setelah berdirinya Boedi Oetomo, Indische Vereniging didirikan di lingkungan mahasiswa Indonesia di Holand, dan tahun 1922 nama Indische Vereniging diganti dengan Indonesische Vereniging, kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama baru ini pada saat yang bersamaan mengetengahkan nama politis yang ditujukan untuk mengharumkan nama Ibu Pertiwi.

Majalah Hindia Putra pun diubah namanya menjadi Indonesia Merdeka. Tahun 1927 Mohammad Hatta dan tiga kawannya ditangkap, dipenjarakan dan diadili di Pengadilan Den Haag. Pembelaan (pleidooi) Hatta berjudul Indonesi? Vrij (Indonesia Merdeka). Terkenal dalam pembelaan Bung Hatta di Den Haag itu yang

Sri-Edi Swasono

menyatakan: "... lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain. ...". Dua tahun kemudian, 1930, Soekarno dipenjarakan dan diadili di Bandung, dengan pembelaannya yang berjudul Indonesi? Klacht Aan (diterjemahkan sebagai Indonesia Menggugat).

Pada 28 Oktober 1928 di Jakarta dideklarasikan Sumpah Pemuda, salah satu tonggak utama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda ini



ditegaskan perkataan "Bangsa Indonesia" (... mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia).

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menegaskan kebangsaan Indonesia:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan

Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l. diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus tahun 1945

Atas nama Bangsa Indonesia
Soekarno - Hatta

Kalimat "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l." dalam Proklamasi Kemerdekaan itu, ditindaklanjuti. Pada 27 Desember 1949 disetujui Perjanjian KMB yang pada dasarnya Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatannya atas Hindia-Belanda kepada Pemerintah Indonesia.

Barangkali kalimat "hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l." dalam Proklamasi Kemerdekaan itu, juga berlanjut dalam wujud Deklarasi Pemerintah RI, 13 Desember 1957, yang sering disebut Deklarasi Djuanda, yaitu: Suatu deklarasi yang cermat, hebat, dan monumental, yang tidak memisahkan pulau-pulau Indonesia di lautnya, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah "negara kepu-

lauan", yaitu satunya Tanah dan Air.

Dengan dikeluarkannya Deklarasi Pemerintah RI 13 Desember 1957 itu, maka Ordonansi Hindia-Belanda tahun 1930 tidak berlaku lagi di Indonesia dan garis teritorial laut Indonesia yang sebelumnya hanya 3 mill menjadi 12 mill. Wilayah kedaulatan Indonesia yang semula sekitar 2 juta kilometer persegi, menjadi lebih luas 2,5 kali lipat, dari 2,027,087 kilometer persegi menjadi 5,193,250 kilometer persegi, belum termasuk Irian Barat.

Dikemukakan oleh Nugroho Wisnumurti (alm mantan Dubes RI di PBB) suatu catatan sejarah yang penting: deklarasi

Pemerintah RI, 13 Desember 1957, di atas menunjukkan peranan yang menentukan dari Pak Chairul Saleh sebagai pendorong utama lahirnya Prinsip Negara Kepulauan dan Mochtar Kusuma-atmadja konseptornya. Selanjutnya Deklarasi Pemerintah RI yang disebut pula Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, dituangkan dalam UU No. 4 Th 1960 Tentang Perairan Indonesia. (Saat itu belum diakui oleh dunia internasional).

Ujung perjuangan yang sangat panjang, selama 25 tahun melalui perjuangan berat yang sangat gigih untuk memperoleh pengakuan internasional di PBB. Akhirnya Indonesia memperoleh "kemenangan", yaitu pada UNCLOS III (United Nations Conventions on the Law of the Sea), di Montego Bay, Jamaica, pada bulan Desember 1982.

Pimpinan heroik pada Konferensi Hukum Laut PBB ke-III ini adalah Prof. Mochtar Kusuma-atmadja (Ketua) dibantu tokoh-tokoh ahli hukum laut sebagai Wakil-Wakil Ketuanya, termasuk Dr Hasjim Djalal dan Nugroho Wisnumurti.

Konsep di balik UU No. 4/1960 kemudian kita kenal sebagai Wawasan Nusantara yang memandang Indonesia sebagai kesatuan wilayah bangsa Indonesia dan negara yang utuh, darat dan lautnya tidak terpisah. Peran Mochtar Kusuma-atmadja sangat menentukan. Gelorakan terus semangat kebangkitan nasional. (*)-d

**)Prof Sri Edi Swasono MPA PhD,
Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan
Tamansiswa.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Pendidikan Harus Mempertinggi Derajat Kemanusiaan



Sri-Edi Swasono

HARI ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, sekaligus memperingati hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara, tanggal 2 Mei. Ki Hadjar telah dinobatkan oleh pemerintah Republik

Indonesia sebagai Bapak Pendidikan Nasional, sebagai pengakuan negara terhadap perjuangan beliau di bidang pendidikan. Ki Hadjar ikut mendirikan Republik Indonesia. Sebagai anggota BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945, beliau memimpin perumusan Pasal 31 UUD 1945 (mengenai Pendidikan) dan Pasal 32 UUD 1945 (mengenai Kebudayaan). Ki Hadjar telah pula ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Hari ini, 2 Mei 2025, Ki Hadjar berusia 136 tahun.

Tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk membentuk pemerintah Negara yang "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Apakah pendidikan nasional kita telah melahirkan generasi-generasi yang cukup tangguh untuk melaksanakan tujuan kemerdekaan ini? Termasuk dalam doktrin nasional ini adalah kemampuan untuk mengabdikan dan mencintai Ibu Pertiwi, tidak melakukan tindak korupsi dan khianat terhadap Tanah-Air.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orangtua, dan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan, seperti kurikulum dan menjamin mutu Pendidikan sesuai tuntutan zaman. Orangtua berperan dalam mendidik dan membimbing anak di rumah, mengenal sopan-santun, persahabatan, dan kebersamaan. Sementara sekolah bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan formal. Masyarakat juga dapat berkontribusi memberi contoh dalam berperilaku sosial, menjaga identitas bangsa dan kebanggaan nasional.

Demikian pula di Tamansiswa, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu dicapai melalui "Tri Sentra Pendidikan".nya Ki Hadjar, yaitu pendidikan di keluarga, di sekolah dan di masyarakat.

Tugas di sekolah dalam globalisasi *semrawut* ini makin berat. Terjadi defisit pendidikan di keluarga. Ibu-ibu mulai banyak bekerja di luar rumah. Saat ini 61% wanita Indonesia bekerja di pabrik, pendidikan anak-anak defisit waktu. Sedang tata-nilai di masyarakatpun mengalami perguncangan dalam globalisasi saat ini, pendidik di masyarakat-



murid. Secara khusus perlu diperhatikan *ing madya mangun karsa* sebagai upaya menumbuhkan kehendak, agar mampu berinisiatif dan berinovasi.

Kita wajib menjunjung tinggi guru-guru kita pada posisi terhormatnya, yaitu kemampuannya menghasilkkan anak-negeri yang berkarakter, bermutu dan berintegritas tinggi, yang sekaligus juga alam-pikiran dan tindak-tanduknya berpedoman kepada nilai-nilai ketamansiswaan "*lawan sastra ngesti mulya*" (de-

ngan ilmu kita mencita-citakan kebahagiaan dan kesejahteraan). Apalagi dalam globalisasi saat ini, tuntutan memiliki kemampuan teknologi-tinggi dan aplikasi *artificial intelligence*, maka ajaran ini makin relevan. Demikian pula perlunya berpedoman pada "*suci tata ngesti tunggal*" (dengan suci hati kita mencita-citakan kesempurnaan).

Kata Ki Hajar, Pendidikan harus menjurus pada usaha mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Berkepribadian "*ngandel-kandel-kendel-bandel*" (percaya kepada Tuhan, percaya-diri, berani, tahan-banting). Jelaslah tugas guru tidaklah mudah, sangat berat. Jadi pendidikan bagi calon-calon guru, ataupun *up-grading* rutin para guru, haruslah canggi, terarah dan progresif. Gurulah yang membentuk masa depan Indonesia untuk maju dan gemilang.

Ki Hadjar ikut mendirikan Republik Indonesia, jadi berarti pula Tamansiswa harus ikut merasa mendirikan Republik Indonesia. Karena itu Tamansiswa wajib bersama-sama seluruh rakyat, merawat sebaik-baiknya Republik Indonesia. Menjaga eksistensi, kelestarian Indonesia dan menjaga keberdaulatan dan keutuhan tanah air Indonesia. (*)-d

***Prof Dr Sri-Edi Swasono, Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.